...Sekda: Disdik Memang Banyak Masalah

Sambungan Hal.1

Ditegaskan Sekda Acep, jika memang kebijakan kepala sekolah tersebut itu adalah Pungli.

"Ya, itu pungli, tidak boleh seperti itu," ujarnya.

Selain itu, cara tersebut mencoreng lembaga pendidikan khususnya, dan pemerintahan daerah Kabupaten Karawang umumnya.

"Kalau misalkan ada yang komplain, jangan malah diintimidasi. Justru seharusnya menjadikan instrospeksi dan bahan perbaikan,"ucapnya.

"Kita akan minta ke Disdik dan melakukan evaluasi," tegasnya kepada Koran Berita saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/2).

Lebih lanjut diungkapkan Sekda, pihaknya akan segera melakukan pembenahan di tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang (Disdikpora).

Karena ia merasa heran dengan Disdik yang memang kerap memiliki banyak masalah.

"Ya, Disdik memang banyak masalah terus, harus dibenahi. Dan apa memang ini kebiasaan atau apa, ya harus dibenahi, akan kita benahi,"tandasnya.

Disoal keberadaan Dewan Pendidikan, Sekda mengakui memang tidak aktif, padahal keberadaannya sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan.

"Semua harus bekerja Dewan Pendidikan, Dewan Pengawas BUMN, Dewan Pengawas lainnya. Inikan banyak yang tidak bekerja sistemnya, kalau ada apa- apa kabeh ka Sekda,"sesalnya. Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina turut angkat bicara. Politisi Partai Golkar ini sangat menyayangkan jika benar tindakan Kepsek seperti itu sudah sangat keterlaluan.

Pasalnya, menurut Sri, pungutan di sekolah harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dijelaskannya, Permendikbud itu mengatur, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, secara wajar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ditegaskan Sri, pihaknya mendorong Bupati sebagai Kepala Daerah dan pemilik kebijakan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) juga Ketua PGRI Kabupaten Karawang untuk menindak tegas dengan menonjobkan kepala sekolah tersebut.

"Agar ada efek jera," tegasnya.

Sri menginginkan, kejadian- kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena sangat mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.

Meski ia mengakui, fenomena pungutan-pungutan di sekolah- sekolah adalah fenomena gunung es yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Namun menurutnya hal tersebut tidak menjadi alasan, pihak sekolah melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa terutama mereka (Orang Tua Siswa) yang tidak mampu.

"Menurut saya bupati harus memanggil Disdik dan PGRI -nya, minta agar segera dilakukan pembinaan kepada Kepsek tersebut. Jika tidak bisa dibina ,turunkan dari jabatannya. Posisikan menjadi guru lagi atau dinonjobkan." tegasnya.

"Mengapa saya meminta dinonjobkan, karena kalau pemecatan kan menurut saya prosesnya sulit, pulangkan saja lagi ke dinas. Saya yakin jika ini diterapkan akan menjadi efek jera bagi sekolah- sekolah yang lain,"imbuhnya kepada Koran Berita, Minggu (9/2).

Kembali Sri menandaskan, jika kemudian tidak ada tindakan tegas dari Disdik dan PGRI, pihaknya akan segera meminta PGRI Propinsi Jawa Barat untuk turun menindaklanjuti.

Karena, dugaan pungli ini sudah ia sampaikan kepada Ketua PGRI Propinsi Jawa Barat pada saat rapat bersama beberapa waktu lalu.

"Ketika guru melakukan perlakuan keras kepada anak, pasti ada orang tua yang akan melaporkan. Saya tunggu aja kalau tidak dinonjobkan saya akan minta Ketua PGRI Propinsi Jawa Barat untuk turun,"ungkapnya.

Terakhir, Sri yang duduk di Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat ini mengimbau agar kedepan Pemkab Karawang melalui Dinas Pendidikan agar lebih selektif lagi ketika mengangkat kepala sekolah.

Selain uji kompetensi dan kelayakan, menurutnya tes kepala sekolah itu harus juga ada psikotes.

"Tes kejiwaan itu perlu, karena seorang kepala sekolah harus menjadi contoh dan panutan siswa siswi didiknya, bukan hanya asal ditempatkan,"pungkasnya. (nin/ds)